

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan Merupakan Suatu Langkah Membuat Sesuatu Yang Belum Ada Menjadi Ada atau membuat suatu perubahan yaitu membuat sesuatu menjadi baik atau meningkat. Pembangunan nasional yang berlandaskan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia.

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kegiatan yang produktif. Hal ini tampaknya suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini sering kali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang (UNDP : *Human Development Report* 2015, hlm. 7)

Pembangunan manusia di artikan sebagai suatu proses perluasan pilihan masyarakat melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan (UNDP, BPS 2015, hlm. 9)

Didalam indeks pembangunan manusia terdapat Modal intelektual (Intellectual Capital). Menurut Edvinsson dan Malone (1997) dan boeksestein (1997) dalam Ulum (2009, hlm. 14) menyatakan bahwa : 'Intelektual Capital adalah bagian dari aset tidak berwujud'. Sedangkan menurut Organization for Economic cooperation and development (OECD, 1999) dalam Ulum (2009, hlm. 21) menyatakan bahwa : Intelektual Capital sebagai nilai ekonomi dari dua kategori aset tak berwujud : (1) *organisational (structural) capital* dan (2) *human capital*. *Organisational (structural) capital* mengacu pada hal seperti sistem *software*, jaringan distribusi, dan rantai pasokan. *Human Capital* meliputi sumber

daya manusia didalam organisasi dan sumber daya eksternal seperti konsumen dan supplier. Jadi *Intellectual capital* dalam Indeks Pembangunan Manusia adalah sumber daya pengetahuan berhubungan dengan karyawan (*human Capital*), pengetahuan berhubungan dengan pelanggan (*Customer atau Relation Capital*) dan pengetahuan yang berhubungan dengan perusahaan (*Sturctural atau Organization Capital*) yang mana Pemerintah dapat menggunakannya untuk proses pencapaian Indeks pembangunan manusia.

Indeks ini pertama kali di kembangkan oleh pemenang nobel india Amyarta sen dan Mahmud ul haq seorang ekonom pakistan dibantu oleh Neamtu Daniela & Ciobanu Oana, UNDP dalam model pembangunannya, menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam semua proses dan kegiatan pembangunan.

UNDP menyebutkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) pada tahun 2014 sebesar 68,38 persen dan masih menyandang predikat “Sedang” dalam status pembangunan manusia. Meskipun telah berstatus “sedang” indonesia masih berada di peringkat 110 dari 188 negara di tahun 2014. Sementara itu, posisi indonesia di ASEAN di peringkat 110 dan diantara negara ASEAN di peringkat ke-5 setelah Singapura, Brunnei Darussalam, Malaysia dan Thailand. Komponen IPM terdiri dari 3 indikator pembentuk yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan 4 indikator yang digunakan dalam penghitungan indeks pembangunan manusia yaitu angka harapan hidup saat lahir (AHH), angka melek huruf (AMH), gabungan angka partisipasi kasar (APK) dan produk domestik bruto (PDB) perkapita.

Sedangkan IPM yang akan saya teliti adalah capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat. Dimana, Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan IPM yang paling rendah pada (64,89), kalah bersaing dengan provinsi Kalimantan Timur (73,82), Kalimantan Selatan (67,63), Kalimantan Tengah (67,77) bahkan juga dengan Kalimantan Utara (68,64) pada tahun 2014.

Dibawah ini perbedaan IPM secara regional seprovinsi kalimantan periode 2013-2015:

Tabel 1. IPM 2013-2015

No.	Provinsi	2013	2014	2015
1	Kalimantan Barat	70,93	64,89	65,59
2	Kalimantan Tengah	75,68	67,77	68,53
3	Kalimantan Selatan	71,33	67,63	68,38
4	Kalimantan Timur	77,33	73,82	74,17
5	Kalimantan Utara	74,72	68,64	68,76

Sumber : [Http://www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Berdasarkan tabel di atas capaian IPM di provinsi kalimantan barat secara regional kalimantan merupakan provinsi dengan IPM terendah. BPS mencatat IPM kalimantan barat pada tahun 2014 sebesar 64,89 dan capaian IPM Kalimantan Barat berada di peringkat 29 dari 34 Provinsi di Indonesia, dengan status Pembangunan Manusia dalam kategori “sedang”. Walaupun pembangunan manusia kalimantan barat berada di posisi lima terbawah, tetapi kalimantan barat merupakan provinsi dengan perkembangan pembangunan manusia paling cepat yaitu pada 4 dari 34 provinsi atau tumbuh 4,71 persen, dengan pertumbuhan IPM rata-rata 1,16 persen pertahun. Dari capaian indeks pembangunan di atas dengan pendapatan asli daerah provinsi kalimantan barat sebesar Rp 1.621.611.000, dana alokasi umum Rp 1.290.223.000 dan dana alokasi khusus Rp 63.189.000 ketiga faktor di atas yang sangat berperan dalam capaian IPM di kalimantan barat.

Dengan pendapatan asli daerah sebesar Rp 1.621.611.000, dana alokasi umum Rp 1.290.223.000 dan dana alokasi khusus Rp 63.189.000 maka indikator dalam indeks pembangunan manusia yaitu angka harapan hidup kalimantan barat terus meningkat artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Pada tahun 2014, angka harapan hidup saat lahir di kalimantan barat telah mencapai 69,76 tahun, indikator kedua yaitu rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di kalimantan barat telah mencapai 6,83 tahun atau setara dengan kelas VII. Sementara anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 11,89 tahun atau mencapai SMA kelas III. Rata-rata lama sekolah tumbuh 2,15 persen pertahun, sementara harapan lama sekolah tumbuh 2,47 persen pertahun. Dan indikator terakhir yaitu standar hidup dimana dengan meningkatnya angka harapan hidup dan tingkat pendidikan maka kenaikan standar hidup juga meningkat terlihat dari pengeluaran perkapita yang berkisar antara 6,4 juta sampai 13,7 juta rupiah.

Berdasarkan IPM di atas, pencapaian tujuan pembangunan manusia bukanlah hal yang baru bagi Kalimantan Barat. Ada penekanan pada pemenuhan tujuan tersebut, yakni pemenuhan pendidikan universal, peningkatan kesehatan, dan pemberantasan kemiskinan. Hal ini tercermin dalam misi presiden didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Untuk meningkatkan IPM tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat perlu. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup, yaitu pemerataan pembangunan.

Dengan adanya pemerataan pembangunan, terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil pembangunan. Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara, diperoleh pembelajaran untuk mempercepat pembangunan manusia dilakukan dengan dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai. Oleh karena itu alokasi belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan pelayanan. Meningkatnya pelayanan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban bagi masing-masing daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan tersebut dikenal dengan nama otonomi daerah.

Desentralisasi atau otonomi daerah dapat mewujudkan pembangunan yang lebih berhasil, salah satu indikator pembangunan yaitu indeks pembangunan manusia (IPM). Salah satu aspek penting dalam desentralisasi adalah desentralisasi fiskal. Secara konseptual, desentralisasi fiskal mensyaratkan setiap kewenangan yang diberikan harus sesuai dengan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan kewenangan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah pusat berkewajiban untuk menjamin sumber keuangan atas pendelegasian tugas dan wewenang dari pusat ke daerah.

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dana perimbangan

yang dimaksud terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan tersebut bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antardaerah (*horizontal imbalance*). Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Salah satu tujuan utama pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lain untuk memnuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan penelitian dari Williantara & Budiasih (2016) di Kabupaten/Kota Bali yang menyatakan tidak ada pengaruh dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia. Maka, Harahap (2011) meneliti kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa DAU, DAK dan DBH tidak mempunyai pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, Putra & Ulupui (2015) menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Dari sejumlah latar belakang dan permasalahan serta berbagai hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi khusus dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan manusia di provinsi kalimantan barat.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka perumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia?

- b. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia ?
- c. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia ?

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

I.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu :

- a. Manfaat teoritis
Pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Pemerintahan, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya dalam Pembangunan Manusia. Dan juga sebagai tolak ukur atau gambaran pembangunan manusia di kalimantan barat. Dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka menyediakan informasi tentang kondisi pembangunan manusia di kalimantan barat kepada masyarakat.
- b. Manfaat Praktis:
 - 1) Bagi peneliti Penelitian ini di harapkan bisa menambah wawasan ilmu khususnya bidang akuntansi pemerintahan dan akuntansi sektor publik dan pengalaman tentang penelitian yang di harapkan kedepannya bisa lebih memahami tentang faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di pemerintahan.

- 2) Bagi masyarakat Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat yang ingin meneliti tentang Indeks Pembangunan Manusia.
- 3) Bagi provinsi Kalimantan Barat Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam penentuan besarnya PAD, DAU dan DAK.

